



LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan

akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan.

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 telah

banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Terima kasih,

Sinjai, Februari 2021

Mengetahui,

Kepala BPBD Kab. Sinjai



Drs. EUDIA MAN

Pangkat: Pembina Utama Muda

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah direncanakan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

3 indikator kinerja sasaran yang realisasinya dibawah 100% yaitu Jumlah Keanggotaan dalam Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops-PB BPBD Kab. sinjai. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
Isu-isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
Rencana Strategis	12
Rencana Kerja Tahun 2020	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
Capaian Kinerja Organisasi	18
Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020	5
Tabel 2.	Jumlah PNS dan Sukarela Tahun 2020	5
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020	6
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2020	7
Tabel 5.	Penetapan Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 6.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020	19
Tabel 7.	Perbandingan Target 2019 dan Realisasi Tahun 2020.....	20
Tabel 8.	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD	21
Tabel 9.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 10.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk Negara yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana dan data kejadian bencana menunjukkan peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan berbagai peraturan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum terbentuknya kelembagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Perda ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai disusul dengan keluarnya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84); Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84). Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berada di

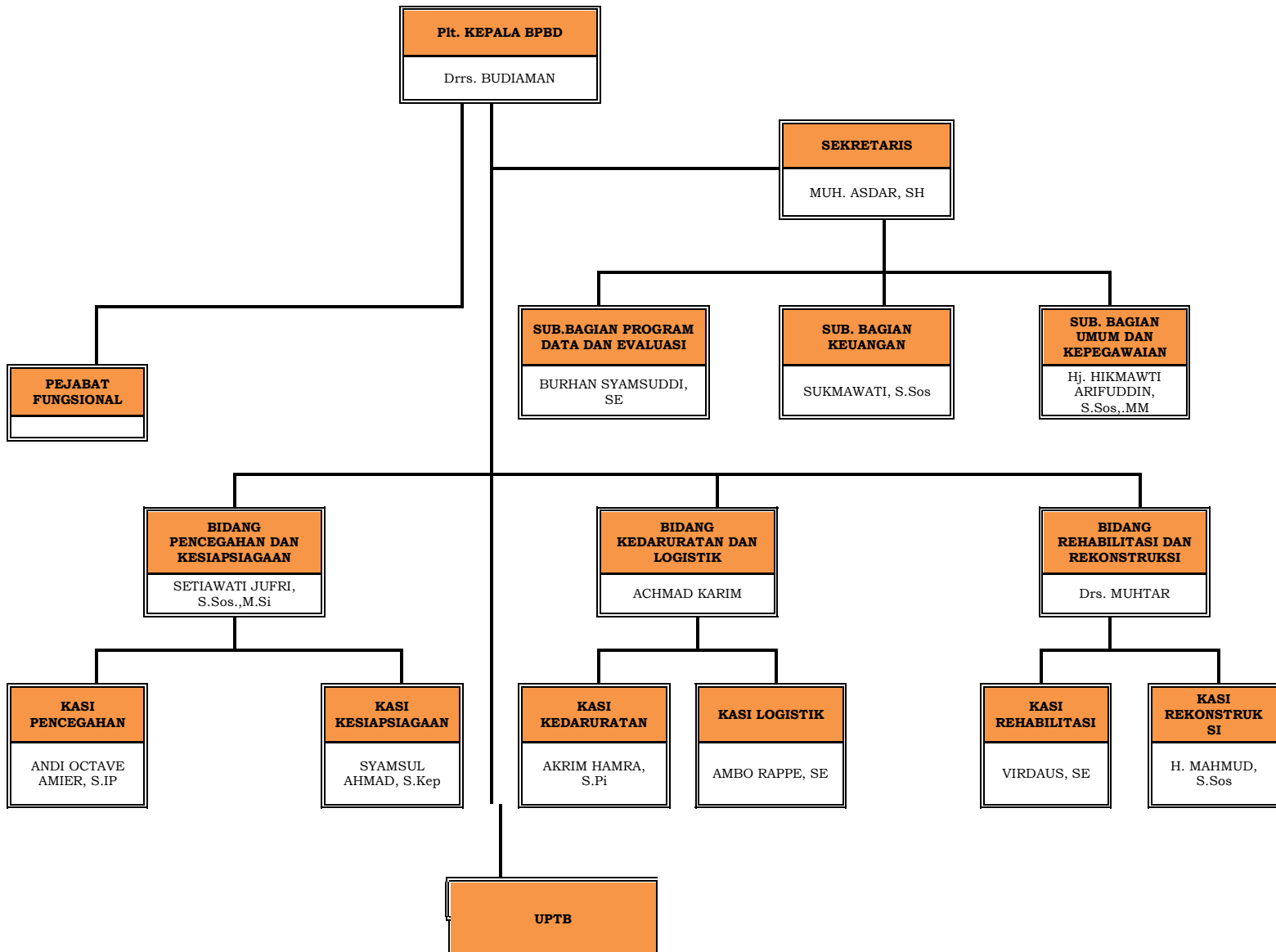
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris Badan membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai didukung dengan 24 orang PNS. Jumlah PNS BPBD Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020

	PNS	Jumlah
1	Sekretariat	24
	Jumlah	24

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jumlah PNS dan PHL Tahun 2020

No	Pendidikan	Status Pendidikan		Jumlah
		PNS	PHL	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	53	55
4	D3	0	0	0
5	S1	20	36	56
6	S2	2	1	3
	Jumlah	24	89	114

Dilihat dari tabel 2. berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai masih kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan, mensinergikan

program/ kegiatan baik antara BPBD Kabupaten Sinjai dengan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan Jumlah PNS 24 orang. Tingkat pendidikan sebagaimana tabel diatas maka perlu ada penambahan pegawai khususnya yang berstatus sebagai PNS.

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten sinjai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020

NO	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	3	12,00
3	Golongan III	20	80,00
4	Golongan IV	2	8,00
Jumlah		25	100

Berdasarkan Tabel 3. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 3 orang atau 12,00%, Golongan III sebanyak 20 orang atau 80,00% dan Golongan IV sebanyak 2 orang atau 8,00%. Melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh Golongan III, dan kebanyakan Staf yang bertugas di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2020

NO	Tingkat Eselon	Jumlah	Persentase
1	II.a	0	0
2	II.b	1	7,69
3	III.a	0	0
4	III.b	4	30,76
5	IV.a	8	61,53
6	IV.b	0	0
Jumlah		13	100

Berdasarkan Tabel 4. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan eselon terdiri atas, eselon II.b sebanyak 1 orang atau 7,69% eselon III.b sebanyak 4 orang atau 30,76%, dan eselon IV.a sebanyak 8 orang atau 61,53%.

C. Isu-Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD baru. delapan tahun menjalankan fungsi penanggulangan bencana, bisa dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari – (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum lagi kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah sangat menguras berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat. Semuanya dijalani dengan *trial* dan *error*. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana

- Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsive ke pendekatan preventif.
- Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Sinjai rentan bencana.
- Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan terkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

- Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah relative baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
- Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.

c. Dalam aspek Ketugasan:

- Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada pengecualian.

- Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
- Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- Belum ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dalam melakukan penanggulangan bencana:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke *preventive*, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat

- pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara persial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten sinjai.
 3. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal, upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
 4. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

5. Terakhir dan terpenting, Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten sinjai. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018-2023

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 2018-2023, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dan Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK).

Renstra digunakan untuk menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Renstra merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka dalam program yang dilakukan ditetapkan indikator kinerja.

1. Penurunan Tingkat Risiko Bencana
2. Pengerahan seluruh potensi yang ada dalam penanganan tanggap darurat bencana
3. Membangun dan Mengembalikan kehidupan masyarakat yang terkena bencana pada tingkat yang wajar dengan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator kinerja utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja utama perlu ditetapkan oleh kepala satuan kerja Perangkat daerah

sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara umum strategi BPBD dalam mencapai visi dan misi, maka diperlukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang menjadi arah pembangunan periode 2018-2023. Mengacu pada sasaran, strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Sinjai, maka sejumlah program yang akan dilaksanakan secara umum terdiri atas program dalam rangka pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penyelenggaraan pelayanan kebencanaan dan program rutin yang dilaksanakan pada umumnya oleh SKPD. Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sinjai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Pelaporan Kinerja
3. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
4. Program Program Logistik dan Tanggap Darurat Bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 5.
Penetapan Kinerja Tahun 2020

No	SasaranStrategi	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnyaupaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	2
		Jumlah sekolah siaga bencana	2
		Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	25%
		Jumlah early warning sistem (EWS)	2
		Peresentase simulasi/uji lapang jenis bencana	10%
		Cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana	100%
2.	Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (24 jam)	25%
		Tingkatkan waktu tanggap darurat	7
		Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	100%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana	7
		Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	100%
		Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	78

3.	Meningkatnya penanganan dan pemulihan pascabencana	Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana	100%
		Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana	24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Sasaran I : Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana

Analisis Pencapaian Sasaran

1. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	desa/kelurahan	2	0	0%
2	Jumlah sekolah siaga bencana	sekolah	2	0	0%
3	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	persen	25%	0	0%
4	Jumlah early warning sistem (EWS)	unit	2	0	0%
5	Peresentase simulasi/uji lapang jenis bencana	persen	10%	10%	100%
6	Cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan	kecamatan	100%	100%	100%

	bencana				
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, umlah sekolah siaga bencana, Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana, dan Jumlah early warning sistem (EWS) untuk tahun 2020 tidak tercapai karena keterbatasan anggaran, sehingga seluruh anggaran kegiatan yang mendukung indicator sasaran tersebut dialihkan ke kegiatan lain yang dianggap lebih penting. Indikator sasaran Peresentase simulasi/uji lapang jenis bencana, capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 10% tercapai 10%. Indikator sasaran cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana, capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 100% tercapai 100%.

b. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	0%	0%
Jumlah sekolah siaga bencana	0%	0%
Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	0%	0%

Jumlah early warning sistem (EWS)	0%	0%
Persentase simulasi/uji lapang jenis bencana	100%	100%
Cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, jumlah sekolah siaga bencana, Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana, dan Jumlah early warning sistem (EWS) tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0% disebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga seluruh anggaran kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut dialihkan ke kegiatan lain yang dianggap lebih penting. Indikator Persentase simulasi/uji lapang jenis bencana dan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana tahun ini dan tahun lalu capaiannya sama yakni 100%.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	desa/kelurahan	10	0%	0%
Jumlah sekolah siaga bencana	sekolah	10	0%	0%
Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	persen	100%	0%	0%
Jumlah early warning sistem (EWS)	unit	10	0%	0%
Persentase simulasi/uji lapang jenis bencana	persen	100%	100%	100%
Cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana	kecamatan	100%	100%	100%

Capaian Target kinerja jangka menengah untuk indikator kinerja Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, jumlah sekolah siaga bencana, Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana, dan Jumlah early warning sistem (EWS), sampai tahun 2020 yaitu 0% disebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga seluruh anggaran kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut dialihkan ke kegiatan lain yang dianggap lebih penting. Untuk indikator kinerja

Peresentase simulasi/uji lapang jenis bencana dan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana capaian kinerjanya yaitu 100%.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Factor pendukung keberhasilan pelaksanaan indicator kinerja antara lain:

- 1) Kerja sama Tim yang solid
- 2) Didukung anggaran yang memadai

Faktor tidak tercapainya target:

- 1) Anggaran dialihkan ke Kegiatan lain yang dianggap lebih penting.

- e. Analisis atas Efesiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 sasaran Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana adalah Rp. 172.549.900,- dan mengalami Refocusing penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Rp.149.274.300,-, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.139.062.800,- atau 97,81%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana yaitu Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana.

Kegiatan yang mendukung :

1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2. Gladi Kesiapsiagaan Bencana
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Sasaran II : Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan
tanggap darurat bencana

Analisis Pencapaian Sasaran

1. Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam)	persen	25%	25%	100%
2	Tingkatkan waktu tanggap darurat	hari	7	7	100%

3	Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Persen	100%	100%	100%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana	Jam	24	2 (rata-rata)	100%
5	Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	Persen	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	Nilai/angka	78	86,29	110%
Rata-rata Capaian Kinerja					101,7%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam) capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 25% tercapai 100%. Capaian indicator Tingkatkan waktu tanggap darurat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari 37 kejadian. target 7 hari batas paling lama penanganan tanggap darurat yang telah terjadi terlaksana rata-rata dibawah 7 hari. Capaian indicator Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana, capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 100% tercapai 100%. Capaian indicator Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 24 jam tercapai rata-rata 2 jam setiap kejadian. Capaian indicator Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan capaian kinerja untuk tahun

2020 sebesar 100% dari target 100% (5 kelompok rentan). Capaian indikator Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 110% dari target 78 realisasi 86,29.

b. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam)	100	100
Tingkatkan waktu tanggap darurat	100	100
Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat di wilayah bencana	100%	100%
Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	100%	100%
Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	100%	110%

Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam) , Tingkatkan waktu tanggap darurat, Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat

diwilayah bencana, Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, tahun ini dan tahun lalu capaiannya sama yakni 100%. Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat tahun ini dan tahun lalu mengalami peningkatan, dari 77 menjadi 86,29.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam)	persen	100%	100%	100%
Tingkatkan waktu tanggap darurat	hari	7	7	100%
Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Persen	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana	Jam	24	2 (rata-rata)	100%
Persentase Pemenuhan	Persen	100%	100%	100%

bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan				
Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	Nilai/angka	90	86,29	110%

Capaian Target kinerja jangka menengah untuk indicator Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam) , Tingkatkan waktu tanggap darurat, Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana, Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, capaian kinerjanya yaitu 100%. Capaian Target kinerja Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat pada Jangka menengah yaitu dengan nilai 90 dan target saat ini 86,29 atau dengan persentase 95,87%.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Factor pendukung keberhasilan pelaksanaan indicator kinerja antara lain:

- 1) Siap siaganya Tim Tanggap Darurat 24 Jam

- 2) Adanya Komunikasi yang cepat dari Pemerintah/Masyarakat pada tempat kejadian
- 3) Adanya kerja sama yang baik antar OPD Terkait
- 4) Didukung anggaran yang memadai.

e. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 sasaran Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana adalah Rp. 352.138.900,- dan mengalami Refocusing penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Rp.345.262.600,-, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.332.011.600,- atau 98,21%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung sasaran keandalan dan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana yaitu Program Logistik dan Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan yang mendukung :

1. Operasionalisasi Pos Komando/ Siaga Tanggap Darurat Bencana
2. Pengadaan Logistik dan Kebutuhan Korban Bencana

Sasaran III : Meningkatnya penanganan dan pemulihan
pascabencana

Analisis Pencapaian Sasaran

1. Meningkatnya penanganan dan pemulihan pascabencana

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana	persen	100%	100%	100%
2	Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana	persen	100%	100%	100%
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana	jam	24	2	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana, Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana, capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 100% realisasi 100%. capaian indicator Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 100% dari target 24 realisasi 2 jam.

b. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2019	2020
Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana	100%	100%
Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana, Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana, response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana tahun ini dan tahun lalu capaiannya sama yakni 100%.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana	persen	100%	100%	100%
Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana	persen	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time	jam	24	2	100%

rate) Tim DaLa diwilayah bencana				
----------------------------------	--	--	--	--

Capaian Target kinerja jangka menengah untuk indikator Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana, Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana, response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana Target capaian kinerjanya yaitu 100%.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Factor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:

- 1) Adanya Tim DaLa yang Siap Siaga 24 Jam
- 2) Adanya Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pascabencana yang akurat.

- e. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 sasaran Meningkatnya penanganan dan pemulihan pascabencana adalah Rp. 19.603.340,- dan mengalami Refocusing penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Rp.4,299.000,-, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.4.299.000,- atau 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya penanganan dan pemulihan pascabencana yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Kegiatan yang mendukung :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sarpras Umum
2. Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk akibat Bencana Alam.

Realisasi Anggaran

Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sinjai pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun besar anggaran belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung (Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal) setelah perubahan adalah sebesar .

Tabel 10.
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
----	---------------	----------	-----------	-----

1	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	9.113.750,00	94,93
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.950.000,00	4.008.400,00	67,37
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.098.700,00	1.098.700,00	100,00
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.719.625,00	1.719.550,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00
6	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	56.293.400,00	55.372.500,00	98,36
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	22.415.100,00	21.062.400,00	93,97
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	85.110.000,00	84.880.891,00	100,00
9	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) non PNS	8.748.000,00	6.561.000,00	75,00
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.500.000,00	12.5000.000,00	100,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.750.000,00	3.704.000,00	98,77
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.875.000,00	42.832.000,00	99,90

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.870.000,00	4.847.000,00	99,53
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.550.000,00	5.542.000,00	99,86
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	2.780.000,00	2.780.600,00	100,00
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	3.882.100,00	3.830.600,00	98,67
19	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	0,00	0,00	0
20	Gladi Kesiapsiagaan Bencana	0,00	0,00	0
21	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	142.174.300,00	139.062.800,00	97,81
22	Operasionalisasi Pos Komando/ Siaga Tanggap Darurat Bencana	325.162.600,00	319.111.600,00	98,14
23	Pengadaan Logistik dan Kebutuhan Korban Bencana	12.900.000,00	12.900.000,00	100,00
24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sarpras Umum	0,00	0,00	0

25	Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana alam	4.299.000,00	4.299.000,00	100,00
Jumlah		763.338.425,00	746.886.391,00	97,85

Dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, ditemukan hambatan atau kendala yang tidak berarti, sehingga pencapaian target dapat terlaksana dengan baik (97,85%). Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain, dalam penyelesaian perizinan kendaraan Dinas/Operasional, berupa kendaraan dinas roda empat (aset Kemendagri pusat) tidak terbayarkan disebabkan karena adanya syarat administrasi yang tidak terpenuhi, berupa surat rekomendasi dari Kemendagri RI yang menjadi syarat dalam pengurusan STNK.

Berdasarkan data realisasi belanja yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan karena masih lemahnya kontrol dan kurang kehati-hatian yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan

- b. Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Program dan kegiatan pendukung

Program pendukung sebagai berikut:

1. Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
2. Program logistic dan tanggap darurat bencana.
3. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kegiatan pendukung:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2. Gladi Kesiapsiagaan Bencana
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Operasionalisasi Pos Komando/ Siaga Tanggap Darurat Bencana
5. Pengadaan Logistik dan Kebutuhan Korban Bencana
6. Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sarpras Umum
7. Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana alam

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan. Bagi instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk

pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.